

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta member gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuaiTupoksinya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan untuk menjaga kualitas social masyarakat yang berlangsung saat ini maka diperlukan rancangan awal dari rencana kerjaTahun 2024.

Untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2024 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
15. Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Prov. Jambi 2016-2022.
17. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;

18. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Adapun yang menjadi Tujuan dari penyusunan Renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi umum pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023;
2. Mengetahui kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat daerah

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi mengajukan usulan program sebanyak 7 (Tujuh) program dan kegiatan sebanyak 15 (Lima belas) serta 28 (Dua puluh delapan) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi . Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- b. Pemberdayaan Perempuan, Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - 1). Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. Program Perlindungan Perempuan

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kab/Kota
 - 1). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi.
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - 1). Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

4. Program Pemenuhan Hak Anak

- a. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 1). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 2). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - 2). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan KarangTaruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat.
 - 2). Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - 3). Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerinta Pusat dengan pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - 1). Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA – MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada OrmasPengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2022, tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan, dikarenakan adanya pemangkasan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, namun demikian capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai **94.45 %** .

Program dan kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun 2022 mencakup 7 (Tujuh) program, 15 (Lima belas) Kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) Sub kegiatan, dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi**

KEPALA OPD : Dra. LUTHPIAH

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	APBD SETELAH PERUBAHAN Rp.	REALISASI ANGGARAN			SISA ANGGARAN Rp.
						KEUANGAN		FISIK(%) REAL	
						Rp.	%		
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		270.540.701,00	0,00	270.540.701,00	257.995.521,00	95,36	100,00	12.545.180,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trianingsih, M.E	270.540.701,00	0,00	270.540.701,00	257.995.521,00	95,36	100,00	12.545.180,00
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.308.744.658,00	-491.824.983,00	9.816.919.675,00	9.210.677.638,00	93,82	100,00	606.242.037,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Poppy Arisandi	10.308.744.658,00	-491.824.983,00	9.816.919.675,00	9.210.677.638,00	93,82	100,00	606.242.037,00
3	Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	21.540.900,00	71,80	100,00	8.459.100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ulil Fahmi, S.Th.I	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	21.540.900,00	71,80	100,00	8.459.100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		486.835.393,00	0,00	486.835.393,00	451.859.887,00	92,82	100,00	34.975.506,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	12.283.100,00	0,00	12.283.100,00	12.176.846,00	99,13	100,00	106.254,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	109.417.504,00	0,00	109.417.504,00	109.326.170,00	99,92	100,00	91.334,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ulil Fahmi, S.Th.I	20.000.950,00	0,00	20.000.950,00	20.000.392,00	100,00	100,00	558,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ulil Fahmi, S.Th.I	345.133.839,00	0,00	345.133.839,00	310.356.479,00	89,92	100,00	34.777.360,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		295.918.381,00	0,00	295.918.381,00	270.691.175,00	91,47	100,00	25.227.206,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ulil Fahmi, S.Th.I	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.500.000,00	99,72	100,00	10.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ulil Fahmi, S.Th.I	119.459.880,00	0,00	119.459.880,00	94.330.423,00	78,96	100,00	25.129.457,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	172.948.501,00	0,00	172.948.501,00	172.860.752,00	99,95	100,00	87.749,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		530.189.200,00	0,00	530.189.200,00	495.093.200,00	93,38	100,00	35.096.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ulil Fahmi, S.Th.I	269.900.000,00	0,00	269.900.000,00	239.450.600,00	88,72	100,00	30.449.400,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ulil Fahmi, S.Th.I	204.889.200,00	0,00	204.889.200,00	200.247.600,00	97,73	100,00	4.641.600,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Ulil Fahmi, S.Th.I	55.400.000,00	0,00	55.400.000,00	55.395.000,00	99,99	100,00	5.000,00
II	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		129.253.392,00	-4.920.000,00	124.333.392,00	118.502.466,00	95,31	100,00	5.830.926,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Tyas Harumsari, SKM	129.253.392,00	-4.920.000,00	124.333.392,00	118.502.466,00	95,31	100,00	5.830.926,00
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		322.693.000,00	-42.816.000,00	279.877.000,00	269.826.789,00	96,41	100,00	10.050.211,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Tyas Harumsari, SKM	322.693.000,00	-42.816.000,00	279.877.000,00	269.826.789,00	96,41	100,00	10.050.211,00
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		501.108.800,00	0,00	501.108.800,00	493.175.490,00	98,42	100,00	7.933.310,00
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Tyas Harumsari, SKM	501.108.800,00	0,00	501.108.800,00	493.175.490,00	98,42	100,00	7.933.310,00
III	Perlindungan Perempuan								
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		80.000.000,00	-2.190.000,00	77.810.000,00	74.784.204,00	96,11	100,00	3.025.796,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Tyas Harumsari, SKM	80.000.000,00	-2.190.000,00	77.810.000,00	74.784.204,00	96,11	100,00	3.025.796,00

2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		339.293.600,00	0,00	339.293.600,00	337.060.547,00	99,34	100,00	2.233.053,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Anna Solifariza, SE	339.293.600,00	0,00	339.293.600,00	337.060.547,00	99,34	100,00	2.233.053,00
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		76.806.000,00	0,00	76.806.000,00	75.857.458,00	98,77	100,00	948.542,00
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Tyas Harumsari, SKM	76.806.000,00	0,00	76.806.000,00	75.857.458,00	98,77	100,00	948.542,00
IV	<i>Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>								
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		191.479.000,00	0,00	191.479.000,00	182.916.750,00	95,53	100,00	8.562.250,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sri Hartati, S.E	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	78.914.550,00	92,84	100,00	6.085.450,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sri Hartati, S.E	106.479.000,00	0,00	106.479.000,00	104.002.200,00	97,67	100,00	2.476.800,00
V	<i>Perlindungan Khusus Anak</i>								
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		196.471.000,00	0,00	196.471.000,00	180.132.139,00	91,68	100,00	16.338.861,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sri Hartati, S.E	83.521.000,00	0,00	83.521.000,00	82.459.003,00	98,73	100,00	1.061.997,00
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi (DAK)	Sri Hartati, S.E	112.950.000,00	0,00	112.950.000,00	97.673.136,00	86,47	100,00	15.276.864,00
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		262.044.000,00	0,00	262.044.000,00	180.680.245,00	68,95	68,95	81.363.755,00

	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi (DAK)	Anna Solifariza, SE	262.044.000,00	0,00	262.044.000,00	180.680.245,00	68,95	68,95	81.363.755,00
VI	<i>Penataan Desa</i>								
1	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		93.500.000,00	0,00	93.500.000,00	87.891.400,00	94,00	100,00	5.608.600,00
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Atika Nurpiati, SH	93.500.000,00	0,00	93.500.000,00	87.891.400,00	94,00	100,00	5.608.600,00
VI I	<i>Peningkatan Kerjasama Desa</i>								
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	198.892.244,00	99,45	100,00	1.107.756,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Drs. Atma Jaya, M.Si	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	198.892.244,00	99,45	100,00	1.107.756,00
VI II	<i>Administrasi Pemerintah Desa</i>								
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		483.482.000,00	324.040.539,00	807.522.539,00	795.602.832,00	98,52	100,00	11.919.707,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Atika Nurpiati, SH	92.800.900,00	374.040.539,00	466.841.439,00	460.951.136,00	98,74	100,00	5.890.303,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Atika Nurpiati, SH	200.692.900,00	0,00	200.692.900,00	196.030.123,00	97,68	100,00	4.662.777,00
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Drs. Atma Jaya, M.Si	189.988.200,00	-50.000.000,00	139.988.200,00	138.621.573,00	99,02	100,00	1.366.627,00
IX	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat</i>								
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama berada di Lintas daerah Kabupaten/Kota		2.143.037.380,00	-50.077.540,00	2.092.959.840,00	2.022.765.486,00	94,39	100,00	70.194.354,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Atika Nurpiati, SH	260.510.640,00	-50.077.540,00	210.433.100,00	203.939.912,00	96,91	100,00	6.493.188,00

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah	Drs. Atma Jaya, M.Si	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	199.518.084,00	99,76	100,00	481.916,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Drs. Atma Jaya, M.Si	181.787.540,00	0,00	181.787.540,00	178.931.770,00	98,43	100,00	2.855.770,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Atika Nurpiati, SH	1.500.739.200,00	0,00	1.500.739.200,00	1.440.375.720,00	95,98	100,00	60.363.480,00
X	<i>Pengendalian Penduduk</i>								
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk		300.000.000,00		250.000.000,00	248.659.000,00	82,89	100,00	1.341.000,00
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Hj. Zahnidar, S.pd, M.M	300.000.000,00	-50.000.000,00	250.000.000,00	248.659.000,00	99,46	100,00	1.341.000,00
XI	<i>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>								
	Pengembangan Desain Program, Pengelplaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal		120.737.280,00	0,00	120.737.280,00	117.540.806,00	97,35	100,00	3.196.474,00
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konsling kesehatan Reproduksi dan Hak-hak reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Hj. Zahnidar, S.pd, M.M	120.737.280,00	0,00	120.737.280,00	117.540.806,00	97,35	100,00	3.196.474,00
XI I	<i>Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>								
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga		136.023.880,00	0,00	136.023.880,00	133.923.960,00	98,46	100,00	2.099.920,00
	Peningkatan Kapasitas mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan Program Katahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga	Hj. Zahnidar, S.pd, M.M	136.023.880,00	0,00	136.023.880,00	133.923.960,00	98,46	100,00	2.099.920,00
	Jumlah		17.498.157.665,00	317.787.984,00	17.180.369.681,00	16.226.070.137,00	94,45	99,64	954.299.544,00

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, bahwakerjapelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang berkaitandenganurusanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendallian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun lingkup pelayanan wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, terdiriatas :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Bidang Perlindungan Anak;
3. Bidang PemerintahanDesa/Kelurahan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melalui bidang urusan tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja melalui indikator:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

No.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Raealisasi Capaian	Proyeksi (%)				Catat an Analisis
				2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	-		91,5	91,5	91,5	91,5	90,30%	100%	100%	100%		
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	-		0,85	0,85	0,85	0,85	96,41%	100%	100%	100%		
4	Persentase Pengelolaan Data Gender	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Persentase Kab/Kota Layak Anak	-		9 Kab/ kota	9 Kab/ kota	11 Kab/ kota	11 Kab/ kota	95,53%	100%	100%	100%		
6	Indeks Perlindungan Anak	-		67	67,62	69,87	70	91,68%	100%	100%	100%		
7	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	-		50%	60%	70%	80%	70%	100%	100%	100%		
8	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	-		30	40	50	50	30%	100%	100%	100%		
	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	-		90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Mandiri	-		134	141	148	155	96,90%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Berkembang	-		807	767	731	694	99,76%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Tertinggal	-		84	80	76	72	98,43%	100%	100%	100%		
	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	-		100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%		

Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	-		90%	90%	90%	90%	97,68%	100%	100%	100%	
Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa	-		100%	100%	100%	100%	99,02%	100%	100%	100%	
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	-		1,70%	1,68%	1,65%	1,62%	99,46%	100%	100%	100%	
Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	-		65,44%	65,48%	65,50%	65,52%	97,35%	100%	100%	100%	
Indeks pembangunan Keluarga	-		60,32	60,35	60,39	60,45	98,46%	100%	100%	100%	
Nilai Evaluasi Sakip	-		B	B	B	B	95,36%	100%	100%	100%	
IKM	-		Baik	Baik	Baik	Baik	81,40%	100%	100%	100%	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
2. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan;
3. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman;
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal;
6. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
7. Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik;
8. Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM;
9. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB;
10. Masihnya rendahnya sosialisasi tentang KB dan WUS;

11. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga penyuluh KB;
12. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
13. Masih banyaknya pernikahan dibawah usia 20 tahun dikarenakan kebutuhan sosial;
14. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki. Sehingga dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya diusulkan rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang baik dari pusat, provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2022 ditetapkan lebih mengarah kepada :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
2. Peningkatan Penanganan terhadap Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan Desa dan kelurahan;
5. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan ber-KB;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat.

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang meliputi identitas prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROVINSI JAMBI	Tersedianya Dok Kinerja OPD, Dok Perencanaan, Dok Evaluasi, Dok Renstra dan Renja, Koord dan Sinkronisasi Perencanaan, tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			215.236.926	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROVINSI JAMBI	Tersedianya Dok Kinerja OPD, Dok Perencanaan, Dok Evaluasi, Dok Renstra dan Renja, Koord dan Sinkronisasi Perencanaan, tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			215.236.926	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dok	215.236.926	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dok	215.236.926	
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan			9.479.165.930	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan			9.479.165.930	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	bln	9.479.165.930	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	bln	9.479.165.930	
	Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya SDM Aparatur yang berkualitas			70.261.000	Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya SDM Aparatur yang berkualitas			70.261.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	org	70.261.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	org	70.261.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat			385.198.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat			385.198.950	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	lap	12.283.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	lap	12.283.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	lap	109.874.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	lap	109.874.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	lap	20.000.950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	lap	20.000.950
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	lap	243.040.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	lap	243.040.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan Penunjang Perkantoran			313.593.965	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan Penunjang Perkantoran			313.593.965
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200	lbr	3.510.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200	lbr	3.510.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	bln	119.459.880	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	bln	119.459.880
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	bln	190.624.085	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	bln	190.624.085
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			574.809.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			574.809.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	bln	270.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	bln	270.050.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	bln	205.189.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	bln	205.189.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/ direhabilitasi	12	bln	99.570.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/ direhabilitasi	12	bln	99.570.000
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)			110.539.075	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)			110.539.075
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	1	dok	110.539.075	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	1	dok	110.539.075
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				97.800.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				97.800.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	1	dok	97.800.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	1	dok	97.800.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				469.999.784	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				469.999.784

	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	1	lembaga	469.999.784	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	1	lembaga	469.999.784	
	<i>Perlindungan Perempuan</i>		PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KOMPREHENSIF				<i>Perlindungan Perempuan</i>		PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KOMPREHENSIF				
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					65.050.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					65.050.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dilaksanakan	1	dok	65.050.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dilaksanakan	1	dok	65.050.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					279.998.352	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					279.998.352	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah kab/kota yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100	%	279.998.352	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah kab/kota yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100	%	279.998.352	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				74.596.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					74.596.000		
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1	lembaga	74.596.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1	lembaga	74.596.000			
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)					Pemenuhan Hak Anak (PHA)							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				165.585.056	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					165.585.056		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	dok	83.693.076	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	1	dok	83.693.076			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	dok	81.891.980	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	dok	81.891.980			
	<i>Perlindungan Khusus Anak</i>	INDEKS PERLINDUNGAN ANAK				<i>Perlindungan Khusus Anak</i>	INDEKS PERLINDUNGAN ANAK						

	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					183.841.828	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					183.841.828	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		11	org anis asi		74.141.828	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		11	org nisa si		74.141.828	
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi (DAK)		1	dok		109.700.000	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi (DAK)		1	dok		109.700.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					254.504.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					254.504.000	
	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi (DAK)		1	dok		254.504.000	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi (DAK)		1	dok		254.504.000	
	<i>Penataan Desa</i>						<i>Penataan Desa</i>						
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					45.012.600	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					45.012.600	

Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa yang difasilitasi	1	dok	45.012.600	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa yang difasilitasi	1	dok	45.012.600
<i>Peningkatan Kerjasama Desa</i>	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA				<i>Peningkatan Kerjasama Desa</i>	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA			
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				89.997.264	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				89.997.264
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1	dok	89.997.264	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1	dok	89.997.264
<i>Administrasi Pemerintah Desa</i>	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				<i>Administrasi Pemerintah Desa</i>	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa				364.681.882	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa				364.681.882
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	dok	50.071.500	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	dok	50.071.500
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	dok	244.613.132	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	dok	244.613.132
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	1	dok	69.997.250	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	1	dok	69.997.250
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat</i>	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat</i>	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama berada di Lintas daerah Kabupaten/Kota					1.744.763.121	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama berada di Lintas daerah Kabupaten/Kota					1.744.763.121	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah kab/kota yang ditingkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	lap	125.000.750	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah kab/kota yang ditingkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	lap	125.000.750	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah		Jumlah kab/kota yang melakukan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang difasilitasi (BUMDesa Expo, bimtek penegmebangan pasar Desa, rakor Pamsimas, bimtek Pengembangan usaha Desa Wisata Desa Digital dan perhutanan Sosial)	1	lap	114.997.264	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah		Jumlah kab/kota yang melakukan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang difasilitasi (BUMDesa Expo, bimtek penegmebangan pasar Desa, rakor Pamsimas, bimtek Pengembangan usaha Desa Wisata Desa Digital dan perhutanan Sosial)	1	lap	114.997.264	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	lap	89.999.910	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	lap	89.999.910	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	1	lap	1.414.765.197	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	1	lap	1.414.765.197	

	<i>Pengendalian Penduduk</i>		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				<i>Pengendalian Penduduk</i>		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK			
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk					142.816.762	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk					142.816.762
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal		Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	1	dok	142.816.762	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal		Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	1	dok	142.816.762
	<i>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI				<i>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>		PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI			
	Pengembangan Desain Program, Pengelplaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal					53.276.524	Pengembangan Desain Program, Pengelplaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal					53.276.524
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konsling kesehatan Reproduksi dan Hak-hak reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Jumlah materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	dok	53.276.524	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konsling kesehatan Reproduksi dan Hak-hak reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Jumlah materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	dok	53.276.524
	<i>Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>		INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA)				<i>Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>		INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA)			

E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten dan tingkat Provinsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dikaitkan dengan kebijakan Nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi termasuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Nasional (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Laju Pertumbuhan Penduduk, Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.

Pencapaian tersebut ditandai dengan dilakukannya beberapa program prioritas Nasional dan Provinsi antara lain:

1. Pembentukan UPTD PPA Provinsi Jambi dan penyediaan rumah aman dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Pembentukan kampung KB;
3. Pembentukan Desa mandiri.

B. Tujuan Dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan mengacu pada kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2019, makadirumuskantujuanRencanaKerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagaiberikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Anak dalam Pemenuhan, Penghormatan dan perlindungan Anak;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan;
4. Meningkatkan pemberdayaan, Pelayanan Sosial Dasar dan penguatan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi ekonomi lokal;
5. Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024, yaitu :

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pengaruh utama Gender dan PUHA dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
		Meningkatnya penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak
2.	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk
		Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif
			Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG
		Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri
3.	Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)
4	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

C. Program Dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mengacu pada Permendagri No.50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi akan melaksanakan program /kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) Program, 32 (tiga puluh dua) Kegiatan dan 154 (Seratus lima puluh empat) Sub Kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUG)

- a. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
 - Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban tindak kekerasan kewenangan provinsi
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

- Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
- Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
 - Komunikasi, Informasi, Edukasi kesetaraan gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah
 - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi
- b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

KewenanganProvinsi

- PengembanganKomunikasi, Informasi dan EdukasiPemenuhanHak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak KewenanganProvinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. PencegahanKekerasanterhadap Anak yang Melibatkan Para PihakLingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak KewenanganProvinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi
- b. Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah
 - Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKewenanganProvinsi
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganProvinsi
 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

8. PROGRAM PENTAAN DESA

- a. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Kepala Desa dan DesaAdat
 - Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan DesaAdat yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
 - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

9. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- a. Fasilitasi Kerjasama AntarDesa yang menjadikewenanganProvinsi
 - FasilitasiKerja Sama antarDesa Lintas Kabupaten/Kota
 - FasilitasiKerja Sama DesadenganPihakKetigasi
 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

10. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDesa
 - FasilitasiPenyusunanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
 - PembinaanManagemenPemerintahanDesa
 - Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Fasilitasi pengelolaan aset desa
 - Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitasi pelaksanaan Evaluasi PerkembanganDesasertaLombaDesa dan Kelurahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
 - Pembinaan Aparatur PemerintahDesa
 - Pembinaan peningkatan kapasitas Anggota BPD
 - Pembinaan percepatan pembangunan melalui iBantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
 - PelaksanaanPenugasanUrusan/KewenanganProvinsi yang dilaksanakan oleh Desa
 - Pembinaan dan pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalamPembiayaanDesa
 - Pembinaan dan pengawasan Penetapan Pengaturan BUM DesaKabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antarDesa
 - FasilitasiPenetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Fasilitaspembinaanlaporankepaladesa
 - FasilitasiPencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
 - Fasilitasiperan BPD dalam Penyelenggaraan PemerintahanDesa
 - FasilitasiPengembanganInovasiDesa
 - Fasilitasi Pekan InovasiPerkembanganDesa
 - FasilitasiPenetapanKewenanganDesa dan DesaAdat di Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi, penataan, pemberdayaan dan pendagayunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitas iBulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

12. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
 - Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
 - Advokasi dan sosialisasi GDPK
 - Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
 - Penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
 - Penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
 - advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

- Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - Advokasi dan sosialisasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - Advokasi dan sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
 - Koordinasi, penyediaan, dan pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga
 - Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
 - Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
 - Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga

13. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- a. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
 - Pengembangan dan penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
 - Penguatan Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK

- Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan strategi operasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
 - Peningkatan peran serta dan kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
 - Pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam Program KKBPK

14. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

- a. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal
 - Pembinaan pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
 - Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
 - Peningkatan kapasitas Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
 - Pengembangan dan perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
 - Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
 - Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
 - Penyediaan dan pengembangan Materi IPK
 - Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK
 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
 - Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
 - Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - Penguatan pemberdayaan ekonomi Keluarga
 - Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
 - Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB

Tabel 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					Tolok Ukur	Target							
1	Sekretariat												
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Prov. Jambi	15	dok	215.236.926	PAD		dok	15	300.420.800
	2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	periode penyediaan gaji dan tunjangan	Prov. Jambi	14	bln	9.479.165.930	PAD		bln	14	9.479.165.930
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Predikat AKIP Perangkat Daerah	Prov. Jambi				PAD		Predikat	BB	285.214.400
	3	Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Prov. Jambi	100	org	70.261.000	PAD		org	100	60.000.000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Prov. Jambi	1	lap	12.283.100	PAD		lap	1	15.000.000

	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Prov. Jambi	1	lap	109.874.900	PAD		lap	1	120.000.000
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Prov. Jambi	1	lap	20.000.950	PAD		lap	1	25.000.000
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Prov. Jambi	1	lap	243.040.000	PAD		lap	1	350.000.000
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat	Prov. Jambi	1200	lbr	3.510.000	PAD		lbr	1200	3.510.000
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	12	bln	119.459.880	PAD		bln	12	132.000.000
	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Prov. Jambi	12	bln	190.624.085	PAD		bln	12	210.000.000
6		Penyediaan Barang dan Jasa Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	12	Penyediaan barang dan jasa Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Jumlah Paket					PAD		paket	1	200.000.000
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	12	bln	270.050.000	PAD		bln	12	270.050.000

	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	12	bln	205.189.200	PAD	bln	12	205.189.200
	15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/direhabilitasi	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	12	bln	99.570.000	PAD	bln	12	150.000.000
2		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
	8	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi										
	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	110.539.075	PAD	dok	1	128.592.500
	9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi										
	17	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	97.800.000	PAD	dok	1	180.062.000
	10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi										

	18	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	jmlh lembaga penyedia layanan	Prov. Jambi	1	lembaga	469.999.784	PAD	lembaga	1	469.999.784
3		Perlindungan Perempuan										
	11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
	19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dilaksanakan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	65.050.000	PAD	dok	1	135.000.000
	12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	persentase korban yang terlayani	Prov. Jambi	100	%	279.998.352	PAD	%	100	399.998.646

	13		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi											
		21	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan	Prov. Jambi	1	lembaga	74.596.000	DAK				
4			Pemenuhan Hak Anak (PHA)											
	14		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi											
		22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	83.693.076	PAD		dok	1	159.541.512
		23	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	81.891.980	PAD		dok	1	419.918.228
5			Perlindungan Khusus Anak											

	15	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
		24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah organisasi pendampingan	Prov. Jambi	11	organisasi	74.141.828	PAD		organisasi	11	271.438.960
		25	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah kab/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	109.700.000	DAK				
	16	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							254.504.000					
		26	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	254.504.000	DAK				
6		Penataan Desa												

	17		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat											
		27	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	45.012.600	PAD		dok	1	211.668.100
7			Peningkatan Kerjasama Desa											
	18		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi											
		28	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	89.997.264	PAD		dok	1	200.000.000
8			Administrasi Pemerintah Desa											
	19		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa											
		29	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	50.071.500	PAD		dok	1	314.088.100
		30	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	244.613.132	PAD		dok	1	406.308.172
		31	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	69.997.250	PAD		dok	1	150.000.000
		32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi						dok	1	269.288.500

		33	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasimengenai Pemerintahan Desa diKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi						dok	1	779.963.340
9			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat											
	20		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama berada di Lintas daerah Kabupaten/Kota											
		34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah Laporan	Prov. Jambi	1	lap	125.000.750	PAD		lap	1	388.584.000

	35	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah	Jumlah kab/kota yang melakukan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang difasilitasi (BUMDesa Expo, bimtek penegmebangan pasar Desa, rakor Pamsimas, bimtek Pengembangan usaha Desa Wisata Desa Digital dan perhutanan Sosial)	jumlah Laporan	Prov. Jambi	1	lap	114.997.264	PAD	lap	1	656.354.868
	36	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah Laporan	Prov. Jambi	1	lap	89.999.910	PAD	lap	1	350.000.000
	37	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	jumlah Laporan		1	lap	1.414.765.197	PAD	lap	1	1.500.000.000
10		Pengendalian Penduduk										
	21	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk										
	38	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	142.816.762	PAD	dok	1	226.947.790

	22		Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)											
		39	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi						dok	1	125.864.241
11			<i>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>											
	23		Pengembangan Desain Program, Pengelplaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal											
		40	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konsling kesehatan Reproduksi dan Hak-hak reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	53.276.524	PAD		dok	1	176.641.480
12			<i>Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>											

	24	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga											
	41	Peningkatan Kapasitas mitra dan Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan Program Katahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	1	dok	89.252.024	PAD	dok	1	210.131.674	
								15.524.484.243				19.556.143.457	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Jambi isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 diharapkan mampu di aplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi , diikuti dengan upaya-upaya pemecahan yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

KEPALA DINAS


Dra. LUTHPIAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19691215 198908 2 002